



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**  
*Melaya Masyarakat Informasi Indonesia*  
Jln. Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax. (021) - 3862330

NOTA DINAS

Nomor : *866*<sup>A</sup> /DJIKP.1/PW.01.03/5/2018.

Yth. : Plt. Inspektur III – Inspektorat Jenderal  
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik  
Hal : Penyampaian Hasil Identifikasi Pemetaan Benturan  
Kepentingan di Lingkungan Ditjen IKP  
Klasifikasi : Segera  
Tanggal : 09 Mei 2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Plt. Inspektorat Jenderal Kominfo Nomor 68/IJ/PW/01/06/05/2018 perihal Permintaan Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan dan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi serta hasil rapat terkait identifikasi pemetaan benturan kepentingan, bersama ini kami sampaikan Matriks Identifikasi Pemetaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Ditjen IKP.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

  
SITI MEININGSIH

**IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai Yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Sosialisasi Isu Prioritas</b>			
1	Penetapan Program diseminasi Informasi yang tidak sesuai dengan sasaran kinerja	Pimpinan dan Pejabat Terkait	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang -Vested Interest	- Penyusunan SOP dan Kriteria - Pengawasan Internal - Penandatanganan Pakta Integritas - Peningkatan Kualitas Perencanaan
2	Penetapan Isu Prioritas dipengaruhi oleh Stakeholder	Pimpinan dan Pejabat Terkait	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang -Vested Interest	- Penyusunan SOP dan Kriteria - Pengawasan internal - Penandatanganan Pakta Integritas - Peningkatan Kualitas Perencanaan
3	Pemanfaatan data dan informasi isu prioritas untuk kepentingan pihak lain	Pimpinan dan Pejabat Terkait	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang -Vested Interest - Kepentingan Politis	- Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan - Peningkatan Kualitas Perencanaan - Keteladanan Pimpinan - Penandatanganan Pakta Integritas
4	Penetapan lokasi diseminasi Informasi tidak sesuai dengan isu prioritas	Pimpinan dan Pejabat Terkait	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang	- Penyusunan SOP dan Kriteria - Pengawasan Internal
5	Pemilihan sarana diseminasi informasi tidak sesuai dengan isu prioritas	Pimpinan dan Pejabat Terkait	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang	- Penyusunan SOP dan Kriteria - Pengawasan Internal
6	Penetapan mitra kerjasama diseminasi informasi	Pimpinan dan Pejabat Terkait	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang	- Penyusunan SOP dan Kriteria - Pengawasan Internal
7	Penetapan Narasumber diseminasi Informasi tidak sesuai dengan Isu Prioritas	Pimpinan dan Pejabat Terkait	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang	- Penyusunan SOP dan Kriteria - Pengawasan Internal
8	Penugasan Tim/panitia diseminasi informasi yang tidak sesuai tugas dan fungsinya	Pimpinan dan Pejabat Terkait	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang	- Penyusunan SOP dan Kriteria - Pengawasan Internal
<b>II.</b>	<b>Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas</b>			

1	Penilaian angka kredit pranata humas yang tidak objektif dan diskriminatif	Pejabat Penilai yang ditunjuk	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang	Peningkatan kualitas tim penilai
2	Pelaksanaan Bimbingan Teknis : a. Penetapan Lokasi b. Penetapan Peserta c. Penetapan Narasumber	Pimpinan dan Pejabat Terkait	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang -Vested Interest	- Penyusunan SOP dan Kriteria - Pengawasan Internal
3	Penyusunan Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas tumpang tindih dengan kewenangan stakeholder lain	Kementerian Kominfo, Kementerian PAN RB, dan BKN	belum adanya peraturan turunan atas UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	- Penyusunan kebijakan yang disesuaikan dengan regulasi - Koordinasi dengan Men PAN BKN
III.	<b>Regulasi dan Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</b>			
	Penetapan regulasi dan kebijakan yang menguntungkan pihak/golongan tertentu	Pimpinan dan Pejabat Terkait	-Hubungan Afiliasi -Penyalahgunaan wewenang -Vested Interest	- Penyusunan kebijakan memenuhi aspek formil dan materil - Pengawasan Internal - Penandatanganan Pakta Integritas

**Formulir Isian Implementasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan  
Satuan Kerja Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Saudara telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan di unit kerja Saudara?	Belum ada
2.	Apabila sudah, adakah pedoman yang Saudara jadikan acuan dalam implementasinya di unit kerja Saudara? Mohon disebutkan.	Belum ada
3.	Adakah unit/pihak yang ditunjuk sebagai pengelola/penanggungjawab? Apabila ada, mohon dapat disebutkan Unit/Pihak/Satgas yang ditunjuk dengan melampirkan dasarnya.	-
4.	Dalam bentuk apa saja implementasi penanganan benturan kepentingan yang telah dilaksanakan di unit kerja Saudara? Mohon dapat dijelaskan secara singkat?	-
5.	Apa saja yang menjadi hambatan/kendala yang dihadapi dalam proses penanganan benturan kepentingan di unit kerja Saudara?	Belum diidentifikasi
6.	Mohon berikan masukan/saran terkait bagaimana penanganan yang seharusnya diimplementasikan di satuan kerja.	Dapat disupervisi oleh Itjen
7.	Sebagai tambahan kelengkapan data kami mohon bantuannya untuk melampirkan data/laporan penanganan benturan kepentingan yang telah dilaksanakan untuk periode tahun 2017 apabila ada.	Draft identifikasi benturan kepentingan

Jakarta, 9 Mei 2018

Sekretaris Ditjen  
Informasi dan Komunikasi Publik

  
 Dra. Siti Meiningsih, M.Sc.  
 NIP. 19590529 198503 2002